

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*. PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Djamhari, Eka Afrina, Ricko Nurmansyah, Dwi Rahayu Ningrum, dkk. *Melacak Jejak Pembiayaan Dampak Lingkungan dan Sosial Industri Nikel di Indonesia*. Prakarsa, 2024.

Eriksen, Thomas Hylland. *Small Places, Large Issues: An Introduction to Social and Cultural Anthropology*. Third Edition. Pluto Press, 2010.

Istanto, F. Sugeng. *Penelitian Hukum*. CV. Ganda, 2007.

Jumadi, Nurhayati. *Wawancara*. Desa Kawasi, 26 April 2025.

Kjaer, Poul F. *The Law of Political Economy: Transformation in the Function of Law*. Cambridge University Press, 2020.

MPR RI. *Panduan Pemasarakatan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Cet. 14. Sekjen MPR RI, 2015.

Nawawi, Ismail. *Public Policy*. Institut Teknologi Sepuluh November Press, 2014.

Nezar, Patria, dan Andi Arief. *Antonio Gramsci: Negara & Hegemoni*. Cet. 4. Pustaka Pelajar, 2015.

Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complain): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Sinar Grafika, 2013.

Putra, Fadillah. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar,

2003.

Rasjidi, Lili, dan Arif Sidharta. *Filsafat Hukum Madzhab dan Refleksi*. Remaja Rosdakarya, 1994.

Satriono, Muji, dan Hendra Putranto. *Teori-Teori Kebudayaan*. Kanisius, 2005.

Spohr, Maximilian, dan Max Planc Foundation for International Peace and the Rule of Law (MPFPR). "Human Rights Risks in Mining." German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), 2016. <https://rue.bmz.de/resource/blob/75558/human-rights-risks-in-mining.pdf>.

Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian: Filsafat, Teori dan Praktek*. Raja Grafindo, 2022.

Wiratraman, Herlambang Perdana, dan Asep Yunan Firdaus. *Riset Agraria, Riset yang Mengubah*. Buku I: Metode Riset Aksi. HuMa, 2015.

Jurnal

Afandi, Fachrizal. "Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-legal." *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 5, No. 1 (2022).

Alma, Zitni. "Kajian Ketimpangan dan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Hasil Pemekaran Studi Kasus: Provinsi Kalimantan Timur." *Jurnal Plano Madani* Vol. 13, No. 1 (2024).

Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation." *Journal of the American Planning Association* Vol. 85, no. No. 1 (2019). <https://doi.org/10.1080/01944363.2018.1559388>.

- Basaridiya, Saldi Isra, Ali Safaat, dan Khairul Fahmi. “Competing Concepts: Human Rights in Indonesia’s Constitutional Setting.” *Journal, of Legal Ethical and Regulatory Issues* Vol. 24, No. 5 (2021)
- Foucault, Michel. “the Subject and Power.” *University of Chicago Press: Critical Inquiry* Vol. 8, No. 2 (1982). diakses dari <https://www.jstor.org/stable/1343197> pada Oktober 2024.
- Herlambang, Perdana Wiratraman. “Dinamika Otonomi Daerah dalam Pengembangan Model Partisipasi Publik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Yutidika: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 25, No. 1 (2010).
- Kim, Jae Hong, dan Nathan Jurey. “Local and Regional Governance Structures: Fiscal, Economic, Equity, and Environmental Outcomes.” *Journal of Planning Literature* Vol. 28, no. No. 2 (2013).
- Kjaer, Poul F. “the Law of Political Economy as Transformative Law: a New Approach to the Concept and Function of Law.” *Global Perspectives* Vol. 2, no. No. 1 (2021).
- Kusuma, Winanda, dan Sieska Afriana Sintasari. “Pemekaran Daerah dan Otonomi Daerah Kerangka Hubungan Pusat Daerah.” *Capitan: Constitutional Law and Administrative Law Review* Vol. 1 No. 1 (2023).
- Lating, Ali, Rahmat Suaib, Mujain Bessy, dan Muhammad Risman Amin Boti. “Kinerja Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam Pengusulan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Kepulauan Obi.” *Jurnal Government of Archipelago* Vol. 1, No. 2 (2020).
- Muhammad, Musdar, Muhammad Kamal, dan Suratno Amiro. “Kabupaten Halmahera Selatan: Sektor Unggulan dan Perubahan Struktur Ekonomi.” *Jurnal Ekonomi Excellence Ibnu Sina* Vol. 2, No. 2 (2024).

Munte, Herdi, dan Christo Sumurung Tua Sagala. “Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Penegakkan Hukum* Vol. 8, No. 2 (2021).

Mvondo, Samel Assambe. “Local Communities and Indigenous Peoples Rights to Forests in Central Africa: From Hope to Challenges.” *Africa Spectrum* Vol. 48, no. No. 1 (2013).

Nasar, Ahlun, Anwar, dan Hayati. “Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sebelum dan Sesudah Adanya Tambang Nikel di Desa Roraya Kabupaten Konawe Selatan.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO (JPPS-UHO)* Vol. 8, No. 3 (2023).

Rahma, Hania, Akhmad Fauzi, Bambang Juanda, dan Bambang Widjojanto. “Fenomena Natural Resource Curse dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol. 20, No. 2 (2021).

Rizky, Raden Achmad Nur, Tri Setiady, dan I Ketut Astawa. “Kedudukan Otonomi Daerah sebagai Pondasi dalam Pembangunan Ekonomi.” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* Vol. 1 No. 3 (2023).

Sabel, Charles, Jonathan Zaitlin, dan Jan-Kees Helderma. “Transforming the Welfare State, One Case at a Time: How Utrecht, Makes Custmized Social Care Work.” *Political & Society (PAS)* Vol. 52, no. No. 2 (2024).

Sachs, Jeffrey D., dan Andrew M. Warner. “Natural Resources and Economic Development the Curse of Natural Resources.” *Center For Intrenational Development Harvard University: European Economic Review* Vol. 45 (2001).

Schubert, Karsten. “Freedom as Critique: Foucault Beyond Anarchism.” *Philosophy & Social Criticism* Vol. 47, No.5 (2021). diakses dari <https://doi->

org.ezproxy.ugm.ac.id/10.1177/0191453720917733 pada Oktober 2024.

Suryaningtias, Ade, Khairunnisa Chaniago, dan Yulia Arsanti. “Identifikasi Aktivitas Pencemaran Air yang Merusak Ekosistem Laut di Daerah Pulau Obi, Maluku Utara.” *Indonesia Conference of Maritime* Vol. 2, No. 4 (2024).

Wang, Feng, Seemab Gillani, Rabia Nazir, dan Asif Razzaq. “Environmental Regulations, Fiscal Decentralization, and Health Outcomes.” *Journal Energi & Environment* Vol. 35, no. No. 6 (2024).

Wardana, Agung. “Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah.” *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 5, No. 1 (2022).

Wedel, Janine R. “From Power Elites to Influence Elites: Resetting Studies for the 21s Century.” *Theory Culture & Society* Vol. 34, No. (5-6) (2017).

Wilkinson, Michael A, dan Hjalte Lokdam, “Law and Political Economi”, *LSE Law, Society and Economy Working Papers*, London School of Economics and Political Science Law Department (2018).

Hasil Penelitian Tesis dan Skripsi

Ayumi, Lenida. “Hipotesis Kutukan Sumber Daya Alam Di Era Desentralisasi Indonesia: Analisis Data Panel Tingkat Kabupaten/kota (Tahun 2010-2018).” Tesis Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Universitas Indonesia, 2020.

Musdin, Rasyid. “Tindakan Afirmatif terhadap Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Bantuan Hukum (Studi Peraturan Daerah Bantuan Hukum di Provinsi Jawa Timur).” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/41118/7/15230085.pdf> pada

Oktober 2024.

Ricky, Rariq Muhammad Ghani. “Partispasi Publik dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaannya Khususnya Proyek Strategis Nasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung di Cirata.” Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, 2024.

Suhu, Bakri La. “Pemekaran Daerah: Pro-Kontra dan Konspirasi (Studi tentang Konfigurasi Elit dalam Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi Halmahera Selatan, Maluku Utara).” Tesis Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, 2011.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Industri

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional Daftar Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional Daftar Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan Dan

Pengawasan Kinerja Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penataan Permukiman Dan Pengendalian Pertumbuhan Permukiman di Kawasan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Persiapan Pembentukan Kecamatan Obi Barat Daya Kabupaten Halmahera Selatan.

Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 72 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Relokasi Kawasan Pemukiman Desa Kawasi ke Kawasan Pemukiman Baru.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Lain-Lain

BBC.com. “di Balik Tambang Mineral Milik China yang Menggurita di Indonesia, Argentina, dan Kongo.” Mei 2024.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqvnq8eev8wo>.

Ichi, Mahmud. “DOB Pulau Obi Harus Digaungkan Lagi.” *kabarpulau.co.id*, Februari 2023. <https://kabarpulau.co.id/dob-pulau-obi-harus-digaungkan-lagi/>.

Kecamatan Obi Barat dalam Angka 2024. Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Selatan, 2024.
<https://halmaheraselatankab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/a92c74e416f4070828f76264/kecamatan-obi-barat-dalam-angka-2024.html>.

Kecamatan Obi dalam Angka 2024. Badan Pusat Statistika Kabupaten Halmehera Selatan, 2024.

<https://halmaheraselatankab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/b6112deb7e785ff792f82bb7/kecamatan-obi-dalam-angka-2024.html>.

Kecamatan Obi Selatan dalam Angka 2024. Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Selatan, 2024.

<https://halmaheraselatankab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/3133fc32bd1af9f0923a0a0b/kecamatan-obi-selatan-dalam-angka-2024.html>.

Kecamatan Obi Timur dalam Angka 2024. Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Selatan, 2024.

<https://halmaheraselatankab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/6c79d3d93151a23475820ac9/kecamatan-obi-timur-dalam-angka-2024.html>.

Kecamatan Obi Utara dalam Angka 2024. Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Selatan, 2024.

<https://halmaheraselatankab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/2d9b36ea825e1486731b267f/kecamatan-obi-utara-dalam-angka-2024.html>.

Kompas.com. “Ribuan Warga Pulau Obi Demo Tuntut Pemekaran.” 7 Februari 2011.

https://regional.kompas.com/read/2011/02/07/15314762/~Regional~Indonesia%20Timur#google_vignette.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI Dengan Masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan, BEM Papua Se-Jawa Bali, Dan Panitia Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. DPR RI, 2011.

https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K2_laporan_Lapsing_RDPU_Komisi_II_DPR_RI_dengan_BEM_Papua_PemKab_Halmahera_Selatan_dan_Pan_Pemekaran_Prov_Papua_Barat_Daya.doc&ved=2ahUKEwjh19y3gJWJAxVJTmwGH44MAykQFnoECBMQAQ&usq=AOvVaw3lN4s4nn

[4LHcCW6arXIc26](#).

Masyarakat Kawasi Obi Tolak Relokasi Pemandahan ke Perumahan Baru yang di Bangun Perusahaan. With JejakKasus45. Desa Kawasi, 2023.
<https://www.youtube.com/shorts/6wgyvsfypz4>.

Pardede, Raynard Kristian Bonanio, Aditya Putra Perdana, dan Rini Kustiasih. “Menjaga Jejak Kekayaan Pertanian dan Perikanan Pulau Obi: Hilirisasi Nikel Mengubah Lanskap Kehidupan Warga Pulau Obi, namun Pertanian dan Kelautan Tetap Masa depan Obi.” *kompas.id*, 26 Februari 2024.
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/12/30/bukan-hanya-nikel-obi-punya-kelapa-dan-semangka>.

Sawal, Rabul. “Cerita Warga dari Pulau Penghasil Bahan Baku Batrei Kendaraan Listrik.” *mangobay.co.id*, November 2021.
<https://www.mongabay.co.id/2021/11/14/cerita-warga-dari-pulau-penghasil-bahan-baku-baterai-kendaraan-listrik-1/>.

Tribun Ternate. “Pembangunan Jalan Pulau Obi Halmahera Selatan Gagal, DPRD Nilai Pemprov Tak Punya Itikad Baik.” Februari 2023.
<https://www.youtube.com/watch?v=uFeJmrfynog>.

Wiratraman, Herlambang Perdana. “Analisis Hak Dasar Warga: Konstitusionalisme Ruang Hidup.” *kompas.id*, Maret 2022.
<https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/02/28/konstitusionalisme-ruang-hidup>.

Wawancara

Anganria. *Wawancara*. Desa Baru, 14 April 2025.

La Manca, Suparman. *Wawancara*. Desa Pasir Putih, 2 Juni 2025.

La Munja, Mardan. *Wawancara*. Desa Manatahan, 11 April 2025.

La Siti, Amir. *Wawancara*. Desa Buton, 13 April 2025.

Lajahara, Abdullah. *Wawancara*. Desa Jikohay, 9 April 2025.

Nuru, Rustam Ode. *Wawancara*. Labuha, 23 Juli 2025.

SL. *Wawancara*. Desa Kawasi, 1 Mei 2025.

Subur, Iksan. *Wawancara*. Ternate, 8 Agustus 2025.